



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Juli 2019/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  
**UNIT KERJA** : DEPUTI BIDANG PELAYANAN UMUM  
**SUB UNIT KERJA** : DIREKTORAT PROMOSI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : PURNOMO ANDIANTONO
2. Jabatan : DIREKTUR PROMOSI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
3. NHK : 631316

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	2.200.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m <sup>2</sup> /224 m <sup>2</sup> di KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m <sup>2</sup> /140 m <sup>2</sup> di KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 46 m <sup>2</sup> /35 m <sup>2</sup> di KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	215.000.000
1. MOBIL, HONDA CRV (4X2) AT CBU / JEEP Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
2. MOBIL, DAIHATSU XENIA 1.3 X AT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	150.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	2.565.000.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	----
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	2.565.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang



diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **22 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.